

BAB VI

PENUTUP

VI.1. Kesimpulan

Agenda internasional dalam Asia-Pacific Telecommunity yang melibatkan Indonesia dan Tiongkok sebagai negara anggota dalam mengupayakan harmonisasi telekomunikasi kebencanaan kawasan melalui PPDR diwujudkan oleh kedua negara melalui implementasinya di dalam agenda nasionalnya masing-masing. Adapun baik Indonesia maupun Tiongkok berupaya untuk menyediakan layanan komunikasi bencana yang tidak tertinggal dengan teknologi komunikasi komersial yang berkembang pada masa ini. Jika kedua negara dikomparasikan, kedua negara masih dalam tahap pengembangan penyediaan layanan PPDR. Dalam hal teknologi kebencanaan, melalui pengembangan infrastruktur terutama untuk sistem peringatan dini, Indonesia tengah mengembangkan sistem peringatan dini yang merupakan salah satu fitu dari pengembangan PPDR. Indonesia terbukti tidak sempurna dalam hal penyediaan teknologi sistem peringatan dini dengan melihat kasus yang terjadi pada Tsunami Selat Sunda tahun 2018. Sementara, jika melihat teknologi sistem peringatan dini yang telah tersedia di hampir 90 persen wilayah rawan bencana di Tiongkok, dengan pengembangan PPDR yang diagendakan oleh kawasan Asia-Pasifik, bukan lagi menjadi alternatif teknologi sistem peringatan dini karena sistem tersebut telah tersedia sebelum PPDR merupakan pengembangan pengelolaan bencana kawasan.

Ketidaksempurnaan yang dimiliki oleh Indonesia dalam hal teknologi sistem peringatan dapat dijadikan pelajaran dengan melihat potensi perkembangan digital masyarakat dengan berkembangnya kepemilikan alat telekomunikasi ponsel atau telepon genggam dan ketersediaan layanan yang mengkoneksikan masyarakat sehingga, pengembangan SMS Blast untuk peringatan dini dapat menjadi alternatif sistem peringatan dini di Indonesia bagi masyarakatnya yang terpapar oleh bencana. Akan tetapi, teknologi berdasarkan prinsip sistem peringatan dini UNISDR bukanlah elemen utama yang terbukti dapat mengurangi risiko yang ditimbulkan bencana. Elemen-elemen sistem peringatan dini tersebut diantaranya; pengetahuan bahaya, layanan peringatan secara teknis, penyebaran informasi peringatan, dan respons dari mereka yang mendapatkan

informasi tersebut. Jika infrastruktur saja yang tersedia tanpa memerhatikan edukasi masyarakat tentang bahaya, kesalahan deteksi, informasi apa yang disampaikan dan respons masyarakat bagaimana jika bencana terjadi tidak terpenuhi, sistem peringatan dini tidak berjalan dengan baik.

Sangat tidak adil jika membandingkan kedua negara dengan perbedaannya. Akan tetapi, baik itu Indonesia dan Tiongkok, kedua negara merupakan negara yang sedang mengembangkan teknologi terutama dalam hal telekomunikasi. Indonesia berada pada satu tingkat dibawah Tiongkok jika ,melihat tingkat konektivitas masyarakatnya dalam jaringan. Jika Indonesia dapat menyelesaikan permasalahan sistem peringatan dini melalui pengembangan PPDR yang juga merupakan pengembangan pengelolaan bencana kawasan ini, Indonesia dapat menciptakan lingkungan kerjasama internasional baik bersama aktor privat seperti perusahaan, maupun negara-negara yang bersedia melakukan kerjasama, dimana melihat keadaan Indonesia yang memiliki potensi sebagai wilayah dengan bencana yang sering terjadi sebagai *soft power* negara.

VI.2. Saran

Suatu kesempatan yang disayangkan jika perkembangan teknologi telekomunikasi kebencanaan tidak dikembangkan bersamaan dengan teknologi telekomunikasi komersial untuk Indonesia. Jika melihat potensi kenaikan penetrasi konektivitas masyarakat dengan *broadband* di Indonesia berdasarkan penelitian APJII yaitu 10% setiap 1 tahunnya, sistem peringatan dini menggunakan layanan *broadband* tersebut akan membawa Indonesia pada negara *advanced* yang sekaligus sebagai upaya Indonesia memiliki *soft-power diplomacy*-nya ditengah negara lain yang tidak memiliki sejumlah bencana yang sering terjadi. PPDR di Indonesia telah mencapai tahap uji coba terutama untu fitur peringatan dini melalui pesan dan telah dikembangkan di 60 daerah di Indonesia. Pengembangan ini juga menghadirkan kerjasama berbagai kalangan nasional dan internasional yang dapat menjadi *soft-power diplomacy* Indonesia ditengah negara lain sekaligus menyelesaikan agenda kawasan menciptakan sistem telekomunikasi kebencanaan. Langkah selanjutnya adalah bagaimana masyarakat Indonesia dapat menjadi bagian dari pengembangan tersebut, pengudukasian bencana, dan respons yang

tepat sehingga teknologi dan peran masyarakat dapat menjadi faktor pengurangan kerugian yang dibawa oleh bencana alam.

Penelitian ini membuka kesempatan baru untuk penelitian selanjutnya. Penulis yakin bahwa terdapat suatu kekosongan dari penelitian ini terutama dalam hal *soft-power diplomacy* yang ditekankan dalam penelitian ini untuk Indonesia. Bahwa, penetrasi konektivitas digital misalnya tidak mungkin terkonsentrasi di seluruh wilayah Indonesia. Akan tetapi, kembali kepada keyakinan penulis bahwa, pengembangan PPDR di Indonesia dengan melihat kekurangan dan keseriusan yang diupayakan Tiongkok dapat menjadi potensi perbaikan sekaligus pengembangan daya saing ditengah pengembangan ekonomi digital yang sama halnya dengan Tiongkok, sehingga antara komersial dan kebencanaan tidak saling tertinggal, akan tetapi sejalan. Akan sangat disayangkan jika teknologi komersial meninggalkan teknologi bencana dan hal tersebut ternyata dapat menjadi suatu kesempatan baru untuk potensi daya saing negara.